

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran serta koperasi yang beroperasi di Indonesia. Koperasi adalah sebuah badan hukum yang berazaskan kekeluargaan dan menjalankan usahanya bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan khususnya para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 3 bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Dalam hal ini kemakmuran rakyat merupakan hal yang paling diutamakan bukan hanya kesejahteraan perorangan saja. Koperasi dijalankan dan didirikan secara bersama dengan modal bersama. Oleh karena itu diharapkan koperasi bisa lebih maju dibanding badan usaha lainnya dan dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 bab 1 pasal 1 tentang perkoperasian bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Koperasi sebagai badan usaha organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjalankan kegiatannya secara seimbang, baik dari segi memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatannya maupun berdiri sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mendapatkan laba sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mensejahterakan para anggotanya.

Berdasarkan pernyataan di atas maka koperasi juga memberikan kontribusi dalam pergerakan perekonomian baik orang-seorang maupun badan hukum koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dalam mensejahterakan anggota tentunya koperasi harus mampu memiliki kegiatan usaha yang optimal. Hal tersebut tidak terlepas dari salah satunya pengelolaan keuangan oleh pengelola koperasi. Sehingga pengelola harus memiliki pengetahuan keuangan yang baik atau tingkat literasi keuangan.

Literasi keuangan atau *Financial Literacy* merupakan pengetahuan keuangan, pemahaman dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki melalui perilaku keuangan (*Behaviour*). Dalam kehidupan sehari-hari literasi keuangan sangat penting untuk menjaga pola pengeluaran keuangan agar tetap stabil. Namun, setiap masyarakat belum semua menyadari akan pentingnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal, karena sebagian masyarakat memiliki tingkat pemahaman dalam kemampuan untuk memahami dan menganalisis yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pendapat Remun (2020) dalam Utami dan Darmawan (2021) menjelaskan bahwa literasi keuangan sebagai salah satu alat ukur seseorang terhadap pengetahuan keuangan serta pemahaman

konsep keuangan dan memiliki keyakinan serta mampu dalam mengatur keuangan dalam mengambil keputusan mengenai keuangan jangka pendek, perencanaan keuangan jangka panjang dan memperhatikan kejadian serta kondisi ekonomi yang ada.

Menurut Nofsinger (2001) dalam Isfenti (2014) bahwa perilaku keuangan yaitu suatu sikap manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan (*a financial setting*). Penentuan keuangan atau keputusan keuangan akan berpengaruh terhadap optimalisasi kegiatan usahanya sebagai strategi untuk pengembangan koperasi baik pada koperasi yang memiliki unit usaha sektor riil ataupun hanya unit usaha sektor keuangan.

Tingkat literasi keuangan pengelola sangat berperan penting untuk mendukung kinerja usaha koperasi salah satunya dalam menyikapi pengambilan keputusan serta memperhatikan risiko keuangan hal itu dapat disebut dengan perilaku pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil data Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survey OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang khusus pada literasi keuangan masyarakat sebesar 8,33%. Namun, hal itu belum bisa memaparkan bahwa peningkatan pemahaman literasi keuangan berada pada semua

badan usaha. Berikut persentase tingkat literasi keuangan masyarakat pada beberapa provinsi di pulau jawa:



Gambar 1.1. Tingkat Literasi Keuangan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar 1.1 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan pada masyarakat Provinsi Jawa Barat memiliki persentase terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa yakni sebesar 37,43% ini menandakan bahwa tidak semua masyarakat pada wilayah tersebut menyadari mengenai literasi keuangan termasuk masyarakat yang bekerja di koperasi yang secara tidak langsung akan berdampak pada bagaimana cara masyarakat tersebut melakukan pengelolaan keuangannya. Maka, kajian untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perlu diperdalam kembali secara rinci salahsatunya pada koperasi yang ada di Jawa Barat terutama pada koperasi yang memiliki usaha yang bergerak pada sektor riil.

Persebaran koperasi yang bergerak pada usaha di sektor riil salah satunya ada di kota bandung hal itu dipertegas dengan adanya peningkatan Produk Domestik

Regional Bruto yang tidak sebanding dengan dana simpanan yang ada pada kota bandung. Menurut Direktur Utama LPDB Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa Koperasi sektor riil mampu menjadi akselerator kesejahteraan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan perekonomian. Dari hal tersebut, peneliti melakukan kajian pada koperasi salah satu sektor riil yang ada di kota bandung yakni salah satu koperasi peternak sapi.

Berdasarkan data pada Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat terdapat Koperasi Peternak Sapi yang aktif dan masih menjalankan usahanya diantaranya di Kota Bandung, Bogor, Garut, Kuningan, Sumedang, Cianjur, dan Sukabumi. Adapun perbandingan tingkat persebaran Koperasi Peternak Sapi di Jawa Barat antara lain sebagai berikut:



Gambar 1.2. Grafik Persebaran Koperasi Peternak Sapi di Jawa Barat

Sumber: Website Gabungan Koperasi Susu Indonesia

Berdasarkan gambar 1.2 di atas persentase persebaran Koperasi Peternak Sapi Jawa Barat terbanyak di Kota Bandung. Peneliti menduga bahwa di kota tersebut belum semua koperasi peternak sapi memiliki pengurus dengan tingkat literasi keuangan yang baik. Maka dari itu, peneliti bermaksud meneliti pada salah satu

koperasi peternak sapi yang berada di Kota Bandung yakni Kabupaten Bandung Barat.

Koperasi Peternak Sapi dapat berkembang baik dengan pengendalian secara seksama terhadap kegiatan operasionalnya terutama berkaitan dengan masalah keuangan dengan adanya perencanaan keuangan (*financial planning*) yang baik pada pengelola koperasi dengan dilandasi pengetahuan dan tingkat literasi dalam mengatur arus kas usaha salah satunya dalam penggunaan modal koperasi secara efisien dalam meningkatkan kinerja usaha koperasi.

Menurut Kresna (2021) bahwa kinerja usaha adalah prestasi atau ukuran keberhasilan usaha dalam waktu yang telah ditentukan. Kinerja usaha dapat diukur melalui pertumbuhan penjualan, laba, pendapatan dan jumlah anggota serta kinerja keuangan yang optimal. Selain itu kinerja usaha dapat ditinjau dari kinerja keuangannya.

Kinerja Keuangan merupakan gambaran keadaan keuangan badan usaha pada suatu periode tertentu yang berkaitan dengan aspek penghimpunan dana serta penyaluran dana yang dapat diukur dengan indikator aktivitas, likuiditas dan profitabilitas.

Penelitian ini akan di lakukan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Jawa Barat. Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) merupakan koperasi serba usaha di kecamatan Lembang yang merupakan suatu wadah bagi para petani peternak sapi perah dengan wilayah kerja Koperasi. Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) meliputi wilayah Desa Lembang, Wangunsari, Jayagiri, Cikidang, Cikahuripan, Pagerwangi, Sukajaya, Cilumber. Koperasi

Peternak sapi Bandung Utara bergerak pada unit usaha sektor riil yang memiliki 2 unit usaha, yaitu:

1. Usaha jasa :
 - a. Unit Simpan Pinjam
2. Usaha Dagang :
 - a. Unit Pemasaran, Produksi dan Kualitas Susu
 - b. Unit Pengolahan Susu
 - c. Unit Pakan Konsentrat
 - d. Unit Waserda
 - e. Unit Peternakan Sapi

(Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan KPSBU 2016-2021)

Adapun tabel yang menunjukkan perbandingan jumlah pendapatan antara usaha dagang dengan usaha jasa Koperasi Susu Peternak Sapi Jawa Barat antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pendapatan & Penjualan Unit Usaha KPSBU

Tahun	Usaha Jasa (Rp)	Usaha Dagang (Rp)
2016	65.343.977,99	44.816.935.287,47
2017	72.475.031,53	49.715.070.582,30
2018	58.958.306,73	50.495.449.582,54
2019	51.848.737,81	52.823.477.173,06
2020	21.313.918,05	54.790.069.782,96
2021	14.068.048,51	53.749.007.145,87

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan KPSBU 2016-2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pendapatan bersih koperasi dalam 6 tahun terakhir bisa disimpulkan bahwa pendapatan usaha dagang lebih unggul dan mengalami peningkatan daripada usaha jasa yang berbanding terbalik, tetapi pada

tahun 2021 baik usaha jasa ataupun usaha dagang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut masih belum bisa mengimbangi besarnya pendapatan pada kedua usaha tersebut dan ini akan mempengaruhi kinerja keuangan operasi.

Besarnya pendapatan atau penjualan dari usaha dagang dan usaha jasa koperasi masih belum dapat menjadi tolak ukur baik tidaknya kinerja usaha koperasi. Hal-hal yang dapat diukur dari kinerja usaha adalah dari sisi kinerja keuangan yang dimiliki koperasi yang di mana itu dapat dilihat dari tingkat rasio keuangan dari segi likuiditas, aktivitas dan tingkat profitabilitas. Rasio keuangan berfungsi untuk mengukur kemampuan badan usaha dalam menggunakan aset – asetnya yang dibandingkan dengan penjualan yang dihasilkan, seperti modal kerja yang berfungsi untuk mengetahui seberapa efisien badan usaha dalam menghasilkan pendapatan dari modal kerjanya dalam periode tertentu dengan membandingkan penjualan dan pendapatan dengan aset lancar dan kewajiban lancar yang ada, seperti tabel modal kerja KPSBU di bawah ini:

Tabel 1.2.
Perhitungan Perputaran Modal Kerja Pada Usaha Dagang

Tahun	Aktiva lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Penjualan (Rp)	Perputaran Modal Kerja
2016	73.188.999.346,78	62.813.621.772,01	44.816.935.287,47	4,32
2017	83.207.115.978,83	70.064.745.884,62	49.715.070.582,30	3,78
2018	81.110.395.584,48	61.832.407.521,55	50.495.449.582,54	2,62
2019	81.838.845.103,96	62.623.186.688,59	52.823.477.173,06	2,75
2020	77.060.971.505,21	64.806.633.819,62	54.790.069.782,96	4,47
2021	75.056.390.607,13	61.045.908.687,18	53.749.007.145,87	3,84

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan KPSBU 2016-2021

Berlandaskan tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa pada koperasi tersebut memiliki tingkat modal kerja yang rendah dan cenderung berfluktuasi. Ini artinya, koperasi tersebut masih belum bisa menghasilkan penjualan yang baik dari modal kerjanya. Semakin rendahnya modal kerja suatu badan usaha, maka akan semakin rendah terhadap tingkat penjualannya dan hal tersebut kurang baik pada kinerja keuangan (*financial performance*) koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 mengenai standar penilaian perputaran modal kerja bahwa pada unit usaha dagang masih mempunyai kriteria sangat kurang baik atau < 6 kali, ini menandakan pada unit tersebut masih belum bisa memutar modal kerjanya dengan optimal. Jika ini tetap diabaikan serta tidak ditindaklanjuti sesegara mungkin, maka akan adanya potensi penurunan penjualan setiap tahunnya yang akan mengakibatkan penurunan profitabilitas koperasi yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja usaha koperasi yang akan berdampak pada kesejahteraan anggota.

Tingkat profitabilitas dapat dihitung melalui beberapa alat ukur seperti *Return On Asset* (ROA) yang berguna dalam menginformasikan kondisi kinerja koperasi terpaut dengan keandalan koperasi memperoleh laba dari total aset yang ada. Berikut ini adalah perbandingan total Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan total aset yang dimiliki Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) :

Tabel 1.3.
Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Tahun	Total SHU (Rp)	Total Aktiva (Rp)	ROA (%)	N/T (%)
2016	1.838.189.916	93.081.212.884	1,97	-
2017	1.944.805.874	103.807.688.150	1,87	0,90
2018	2.023.165.919	104.069.364.818	1,94	1,07
2019	2.164.366.069	105.595.546.714	2,05	1,11
2020	2.234.363.438	102.327.165.553	2,18	1,13
2021	2.345.752.617	99.201.268.838	2,36	1,18

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan KPSBU 2016-2021

Berlandaskan pada tabel 1.3 di atas, *Return On Asset* (ROA) Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) memiliki presentase yang kecil dengan persentase yang naik, ini menandakan pengurus dan pengelola masih belum optimal terhadap pengelolaan aset untuk mendapatkan *profit*. Kategori persentase pada koperasi tersebut tergolong kepada kriteria sangat kurang baik atau masih dibawah 3% sesuai dengan pedoman penilaian koperasi pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola masih belum mengoptimalkan laba dari total aset yang dimiliki.

Adapun perhitungan profitabilitas dari aspek ekuitas dengan menggunakan alat ukur *Return On Equity* (ROE) yang berfungsi untuk menaksir besarnya tingkat keandalan koperasi untuk mendapatkan *profit* dari ekuitas mandiri yang dimiliki. Berikut ini adalah perbandingan data Sisa Hasil Usaha dan ekuitas mandiri dari Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) :

Tabel 1.4.
Perhitungan *Return On Equity* (ROE)

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Total Ekuitas (Rp)	ROE (%)	N/T (%)
2016	1.838.189.916	27.323.363.735	6,73	-
2017	1.944.805.874	32.248.934.952	6,03	0,30
2018	2.023.165.919	40.811.750.137	4,96	-0,07
2019	2.164.366.069	42.343.435.617	5,11	1,15
2020	2.234.363.438	36.995.531.734	6,04	1,93
2021	2.345.752.617	38.155.360.151	6,15	0,11

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan KPSBU 2016-2021

Berlandaskan standar penilaian ROE pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 mengenai perhitungan *Return On Equity* (ROE) pada KPSBU berada pada kriteria kurang baik dikarenakan masih berada di bawah 9%. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola koperasi masih belum optimal dalam mengelola ekuitas yang ada untuk menghasilkan *profit*. Laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi menjadi satu dari beberapa faktor yaitu menggambarkan tingkat kinerja keuangan koperasi yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan anggotanya. Berikut tabel perkembangan SHU KPSBU tahun 2016-2021:

Tabel 1.5.
Perkembangan SHU KPSBU Tahun 2016-2021

Tahun	Pendapatan	N/T (%)	Biaya	N/T (%)	Sisa Hasil Usaha	N/T (%)
2016	44.816.935.287	-	42.366.015.399	-	1.838.189.916	-
2017	49.715.070.582	10,9	47.121.996.084	11,2	1.944.805.874	5,8
2018	50.495.449.583	1,6	47.797.895.024	1,4	2.023.165.919	4,0
2019	52.823.477.173	4,6	49.937.655.748	4,5	2.164.366.069	7,0
2020	54.790.069.783	3,7	51.810.918.532	3,8	2.234.363.438	3,2
2021	53.749.007.146	-1,9	50.741.631.996	-2,1	2.206.139.539	-1,3

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan KPSBU 2016-2021

Berdasarkan Tabel 1.5 terdapat fluktuasi pendapatan dan biaya KPSBU. Kenaikan dan penurunan pendapatan serta biaya, sangat berpengaruh pada kenaikan dan penurunan SHU yang terjadi pada KPSBU. SHU merupakan manfaat ekonomi tidak langsung yang akan diterima oleh anggota yang berdampak pada kesejahteraan anggota atau nilai pemilikinya meningkat. Meskipun SHU merupakan manfaat ekonomi tidak langsung, namun SHU juga berpengaruh terhadap manfaat ekonomi langsung karena sebagian dari SHU akan dialokasikan ke dana cadangan. Ketika terdapat alokasi dana cadangan, maka modal sendiri koperasi semakin kuat dan semakin mandiri.

Berdasarkan beberapa data di atas, pengurus dan pengelola KPSBU masih belum mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang merujuk pada lemahnya implementasi antara pengetahuan, pemahaman (*knowledge*) yang dimiliki dengan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*ability*). Permasalahan terkait literasi keuangan pada Pengurus Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara jika dilihat dari data sekunder terjadi penurunan dari beberapa perhitungan rasio karena pengelola koperasi dalam mengelola keuangannya belum dilakukan secara maksimal. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat literasi keuangan pengurus Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) dengan melihat fenomena perilaku pengelolaan keuangan pengurus di lapangan dalam mempengaruhi kinerja usaha koperasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian telah dilakukan sebelumnya yaitu oleh: Liva, Ainul, Thoriq (2019) yang berjudul “Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan koperasi pegawai negeri dibandar lampung perilaku pengelolaan

keuangan pengurus koperasi sebagai variabel intervening” bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui kesesuaian perilaku pengelolaan keuangan.

Berdasarkan penelitian dari Fanisa Kris Dayanti, Jeni Susyanti, dan M. Khoirul Anwarodin Broto S (2020) yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan” Pada Pelaku Usaha UMKM Fashion di Kabupaten Malang bahwa literasi, pengetahuan dan sikap keuangan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan. Hal ini membuktikan dengan pemahaman, keterampilan yang didasari pada pengetahuan keuangan akan memberikan efek pada perilaku manajemen keuangan.

Berdasarkan penelitian dari Utami dan Darmawan (2021) yang berjudul “Pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan” pada koperasi simpan pinjam di kabupaten buleleng bahwa tingkat literasi keuangan.

Berdasarkan paparan latar belakang dan peristiwa yang ada, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Berapa besar pengaruh tingkat literasi keuangan pengurus terhadap kinerja keuangan koperasi melalui kesesuaian perilaku pengelolaan keuangan” Berdasarkan yang telah diuraikan di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Literasi dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Usaha”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mendentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi keuangan pengelola koperasi peternak sapi bandung utara
2. Bagaimana perilaku pengelolaan keuangan pengelola koperasi peternak sapi bandung utara
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha
4. Bagaimana pengaruh perilaku pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha
5. Bagaimana pengaruh literasi keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang Peneliti lakukan adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai pengaruh tingkat literasi keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha koperasi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat literasi keuangan pengelola koperasi
2. Perilaku pengelolaan keuangan pengelola koperasi
3. Pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap kinerja usaha
4. Pengaruh tingkat perilaku pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha
5. Pengaruh tingkat literasi keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilaksanakan, Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu aspek teoritis dan aspek praktis bagi koperasi yang bersangkutan. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk menambah ilmu dan wawasan dalam bidang manajemen keuangan khususnya mengenai literasi keuangan (*financial literacy*) serta perilaku keuangan (*financial behaviour*) untuk menjadi bahan referensi dalam pengembangan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan masukan pada bidang keuangan koperasi serta digunakan untuk bahan evaluasi yang berkaitan dengan Tingkat Literasi Keuangan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) pada khususnya dan semua koperasi pada umumnya mengenai bagaimana mempertahankan serta meningkatkan kinerja usaha koperasi.